

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Cetakan Ke-3. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).
- Aritonang, Sahala. *Tindak Pidana di Bidang Ketenagakerjaan*. (Bekasi: Permata Aksara, 2019).
- Asyhadie, Zaeni. *Peradilan Hubungan Industrial*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009).
- \_\_\_\_\_. *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2008).
- Budiarta, I Nyoman Putu. *Hukum Outsourcing: Konsep Alih Daya, Bentuk Perlindungan, dan Kepastian Hukum*. (Malang: Setara Press, 2016).
- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Positif Penghinaan*. (Jakarta: Bayumedia Publishing, 2013).
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Cetakan Ke-3. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).
- Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. *Peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Nomor: 23-PD/FH-UNTAR/III/2014 tentang Skripsi*. (Jakarta: FH UNTAR, 2014).
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Edisi Khusus. (Surabaya: Percetakan M2 Print, 2007).

- Husni, Lalu. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003).
- Lamintang, P.A.F. dan Franciscus T. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- Manullang, E. Fernando. *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*. (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2007).
- Marpaung, Leden. *Tindak Pidana terhadap Kehormatan: Pengertian dan Penerapannya*. (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2007).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).
- \_\_\_\_\_. *Penelitian Hukum*. Cetakan Ke-12. (Jakarta: Kencana, 2016).
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar*. (Yogyakarta: Liberty, 1999).
- \_\_\_\_\_. *Penemuan Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009).
- Mulyadi, Lilik dan Agus Subroto. *Penyelesaian Perkara Pengadilan Hubungan Industrial dalam Teori dan Praktik*. (Bandung: PT Alumni, 2011).
- Mustafa, Bachsan. *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2001).
- Praja, Juhaya S. *Teori Hukum dan Aplikasinya*. (Bandung: Pustaka Setia, 2011).
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000).

- \_\_\_\_\_. *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*. (Jakarta, UKI Press, 2006).
- Salim H.S. dan Erlies Septiani Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2003).
- Simamora, Henry. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. (Yogyakarta: Bagian Penerbitan STIE YKPN, 1999).
- Soedarjadi. *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 1986).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan Ke-11. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009).
- Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2011).
- Suparman, Supomo. *Hukum Acara Peradilan Hubungan Industrial: Tata Cara Penyelesaian Sengketa Perburuhan*. (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009).
- Sutedi, Adrian. *Hukum Perburuhan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Ugo dan Pujiyo. *Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial: Tata Cara dan Proses Penyelesaian Sengketa Perburuhan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Uwiyono, Aloysius et al. *Asas-Asas Hukum Perburuhan*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

\_\_\_\_\_. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989).*

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4279).*

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356).*

\_\_\_\_\_. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2004, Terbit Hari Rabu Tanggal 7 November 2004).*

\_\_\_\_\_. *Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Hak Uji Materil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

\_\_\_\_\_. *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.*

### **C. Putusan**

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 857/Pid/2017/PN.Jkt.Utr tertanggal 18 Januari 2018.

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 95/Pid/2018/PT.DKI tertanggal 16 Mei 2018.

### **D. Kamus**

Umar, Dzulkifli dan Jimmy P. *Kamus Hukum (Dictionary of Law)*. (Surabaya: Grahamedia Press, 2012).

### **E. Jurnal**

Awawangi, Reydi Vridell. "Pencemaran Nama Baik dalam KUHP dan Menurut UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik". *Lex Crimen*. Edisi No. 3 Tahun 2014.

Rohmana, Nanda Yoga. "Prinsip-Prinsip Hukum tentang Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia". *Yuridika*. Volume 32 No. 1 Tahun 2017.

Supriyadi. “Penerapan Hukum Pidana dalam Perkara Pencemaran Nama Baik”.

*Mimbar Hukum*. Volume 22 No. 1 Tahun 2010.

Toelle, Marthen H. “Kriminalisasi Ditinjau Dari Perspektif Teori Hukum Pidana

(*Criminal Law Theory*)”. *Refleksi Hukum*. Volume 8 No. 2 Tahun 2014.

Wijayanta, Tata. “Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam

Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga”. *Jurnal*

*Dinamika Hukum*. Edisi 14 No. 2 Tahun 2014.

## **F. Internet**

Anonim. “KPBI Minta Hakim Bebaskan Dua Buruh Terdakwa Pencemaran

Nama Baik dalam Bipartit”. [https://buruh.co/kpbi-minta-hakim-](https://buruh.co/kpbi-minta-hakim-bebaskan-dua-buruh-terdakwa-pencemaran-nama-baik-dalam-bipartit/)

[bebaskan-dua-buruh-terdakwa-pencemaran-nama-baik-dalam-](https://buruh.co/kpbi-minta-hakim-bebaskan-dua-buruh-terdakwa-pencemaran-nama-baik-dalam-bipartit/)

[bipartit/](https://buruh.co/kpbi-minta-hakim-bebaskan-dua-buruh-terdakwa-pencemaran-nama-baik-dalam-bipartit/), 10 April 2019.

Anonim. “Kriminalisasi Bipartit, Tuntutan Jaksa Penuh Kejanggalan”.

[https://buruh.co/kriminalisasi-bipartit-tuntutan-jaksa-penuh-](https://buruh.co/kriminalisasi-bipartit-tuntutan-jaksa-penuh-kejanggalan/)

[kejanggalan/](https://buruh.co/kriminalisasi-bipartit-tuntutan-jaksa-penuh-kejanggalan/), 12 Mei 2019.